

KERUSUHAN SAMBAS*

Parsudi Suparlan

The violence happened in Sambas was caused by model inter-ethnic relationship which was dominated by designed violence model which used arbitrary by Madurese. The riot at Sambas take the place because arbitrary extermination againts cultural rights which traditionally live in Melayu and Dayak cultural areas by Madurese. The Problem is still continued in the long period given Sambas is not isolated region, and Madurese spread extensively in each of region of West Kalimantan. Moreover, had the Police and activity of officer person in this region keep to be loaded by political interests and economic behaviour as collusion, corruption, nepotism.

Pendahuluan

Perwujudan tindakan manusia adalah hasil saling mempengaruhi antara dorongan-dorongan atau motivasi yang dipunyai pelaku dengan stimuli yang dihadapi dalam lingkungannya dan dengan kebudayaan yang dipunyainya sebagai acuan bagi tindakannya. Dalam pengertian ini pelaku dilihat sebagai yang aktif untuk memutuskan sesuatu tindakan yang harus diwujudkan. Dalam pembahasan mengenai hubungan antarsuku bangsa, kebudayaan digunakan sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang berasal dari sejarah kehidupannya atau pengalaman-pengalamannya dalam hubungan antarsuku bangsa yang berlaku maupun berbagai informasi yang diperoleh dalam kehidupan sosialnya. Pengetahuan dan keyakinan-keyakinan tersebut merupakan sistem-sistem

acuan yang digunakan oleh pelaku secara selektif sesuai dengan stimuli yang dihadapi dalam lingkungannya dan sesuai dengan motivasi-motivasi yang dipunyainya (Suparlan 1986, 1995).¹

Lingkungan yang dihadapi oleh pelaku mencakup struktur-struktur kekuatan sosial yang nyata di mana pelaku terlibat di dalamnya, maupun kenyataan mengenai struktur-struktur kekuatan sosial yang tercatat dan tersimpan dalam kebudayaan pelaku

¹ Suparlan, Parsudi, 1986, "Kebudayaan dan pembangunan," *Media IRA*, Vol.14, No.11, Jurusan Antropologi, UI, hlm. 106-135. Lihat juga Suparlan, Parsudi, 1995, *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an ethnically plurally society*. Tempe, Arizona: Center for Southeast Asian Studies, Arizona State University.

* Terima kasih kepada Jenderal (Pol.) Roesmanhadi yang telah memberikan dukungan biaya bagi penelitian lapangan kasus Sambas ini.

sebagai perangkat-perangkat stereotip dan prasangka sebagai bagian dari kebudayaan pelaku. Sedangkan struktur kekuatan sosial yang berlaku dalam kehidupan yang nyata, dalam kaitan dengan pembahasan mengenai kerusuhan antarsuku bangsa di Kabupaten Sambas, dapat dilihat dalam perspektif teori kebudayaan dominan dari Bruner.

Profesor Bruner² dalam upaya menjelaskan corak ungkapan kesukubangsaan di Bandung dan Medan, telah menggunakan sebuah model yang dinamakannya sebagai hipotesa kebudayaan dominan. Inti dari hipotesa ini adalah bahwa corak ungkapan kesukubangsaan di sesuatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dominasi oleh kebudayaan dan salah satu suku bangsa yang hidup setempat. Di Bandung terdapat kebudayaan Sunda yang dominan, di mana struktur kekuasaan pada tingkat atas sampai dengan tingkat bawah diperuntukkan bagi dan dipegang oleh Orang Sunda. Dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat umum kebudayaan Sunda adalah acuan bagi sopan santun dalam tindakan-tindakan dan bahasa Sunda adalah bahasa yang umum berlaku. Para pendatang dari berbagai suku bangsa yang hidup di Bandung cenderung menjadi seperti Sunda atau menjadi Sunda.³ Sebaliknya di kota Medan, yang tidak mengenal adanya kebudayaan suku bangsa yang dominan, menghasilkan adanya masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaannya yang

relatif otonom. Karena itu di kota Medan, kebudayaan dan bahasa yang digunakan di tempat-tempat umum tergantung dari hasil tawar menawar kekuatan di antara suku bangsa-suku bangsa yang ada setempat dan terlibat dalam interaksi. Hal yang sama juga berlaku dalam posisi-posisi yang ada dalam struktur kekuasaan resmi nasional dan lokal yang ada di kota Medan. Dalam keadaan demikian, kesukubangsaan masing-masing biasanya diaktifkan oleh mereka yang menduduki posisi-posisi kunci; dan karenanya solidaritas suku bangsa menjadi ciri yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kerangka berpikir seperti tersebut di atas saya akan mencoba untuk menunjukkan hakekat kerusuhan yang terjadi di Sambas⁴, dan menunjukkan bahwa kekerasan yang terwujud adalah sebagai produk dan corak hubungan antara suku bangsa yang didominasi oleh cara-cara kekerasan yang terpola yang telah dilakukan secara sepihak oleh orang-orang Madura. Atau dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu Sambas dapat dilihat sebagai imbas balik dari pendominasi dengan cara-cara main kayu, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Madura Sambas sebelum terjadinya kerusuhan Sambas. Kekerasan orang-orang Melayu Sambas terhadap orang-orang Madura Sambas yang berupa pembunuhan dan penghancuran

² Bruner, Edward M., 1974, "The Expression of Ethnicity in Indonesia," dalam Abner Cohen (ed.), *Urban Ethnicity*. London: Tavistock, hlm. 251-288.

³ Suparlan, Parsudi, 1972, *The Javanese in Bandung: Ethnicity in a Medium of Sized Indonesian City*. MA thesis. University of Illinois.

⁴ Lihat Suparlan, Parsudi, 1999b, *Kerusuhan Sambas*, makalah terbatas yang disampaikan kepada Kapolri. Lihat juga Suparlan, Parsudi, 1999c, *Kemajemukan, Hipotesa Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan*. Makalah yang disampaikan pada Jubelium ke-30 *Jurnal Antropologi Indonesia*, UI. Depok, 6 Mei 1999.

rumah serta segala harta milik mereka, secara simbolik dapat dilihat sebagai sebuah upacara pembersihan atau pembersihan terhadap kekotoran yang menimpa kehidupan mereka yang dikarenakan oleh keberadaan dan perbuatan-perbuatan orang-orang Madura.⁵

Dalam hubungan antar suku-bangsa yang relatif tidak berlangsung secara harmonis seperti yang terjadi antara Orang Melayu — Madura dan antara Orang Dayak — Madura di Kabupaten Sambas, hubungan antar pribadi atau perorangan di antara mereka tidak berlaku umum. Yang ada adalah hubungan antarstereotip yang berupa label yang dihasilkan dari hubungan antar-kategori atau label yang tidak menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan. Orang Madura dilihat oleh Orang Melayu sebagai kategori hewan yang kotor, yaitu anjing. Sebaliknya, Orang Madura melihat Orang Melayu sebagai penakut dan hanya kelihatan besar tetapi keropos seperti kerupuk. Sedangkan Orang Dayak melihat Orang Madura sebagai hewan hama dan buruan mereka yang rakus yaitu babi hutan, dan sebaliknya Orang Madura melihat Orang Dayak sebagai kafir dan makhluk yang terbelakang.⁶ Konflik antar individu

yang menghasilkan kerusuhan antar-suku bangsa dan yang terwujud sebagai kekerasan dapat dipahami dengan mengacu pada stereotip suku bangsa yang mereka punyai masing-masing dan yang mereka gunakan. Yaitu, kekerasan telah terwujud karena pihak lawan tidak lagi dilihat sebagai kategori manusia atau orang-perorang tetapi sebagai kategori hewan atau benda yang sudah sewajarnya untuk dihancurkan.

Dengan menggunakan model hipotesa kebudayaan dominan dan Bruner akan saya tunjukkan bahwa

kekerasan telah terwujud karena pihak lawan tidak lagi dilihat sebagai kategori manusia atau orang-perorang tetapi sebagai kategori hewan atau benda yang sudah sewajarnya untuk dihancurkan

pada dasarnya kebudayaan Melayu di pantai barat Kabupaten Sambas adalah kebudayaan dominan, dan mencoba untuk membas hubungan antara Melayu dengan Madura yang memuncak sebagai kerusuhan antarsuku bangsa adalah se-

bagai akibat dan tidak diakuiinya keberadaan kebudayaan Melayu yang dominan tersebut oleh orang-orang Madura yang mempunyai dorongan-dorongan yang kuat untuk memupuk kekayaan dengan cara yang cepat dan mudah. Dan, secara lebih khusus lagi adalah disebabkan oleh didominasinya kebudayaan Melayu di pantai barat Kabupaten Sambas oleh kebudayaan Madura yang bercorak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang kuat, sehingga orang-orang Melayu kehilangan jatidiri suku bangsa dan kebudayaannya. Corak kekerasan dan kesewenang-wenangan kebudayaan Madura dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sambas telah dimung-

⁵ Douglas, Mary, 1966, *Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo*. London: Routledge and Kegan Paul.

⁶ Suparlan, Parsudi, 1998, "Konflik antara Orang Dayak dan Orang Madura di Kalimantan Barat," *Wacana Antropologi*, Vol.2, No.2, Asosiasi Antropologi Indonesia, hlm. 7-9. Lihat juga Suparlan, Parsudi, 1996b, *op.cit.*, hlm. 251-288.

kinkan terwujud karena tidak atau kurang berfungsinya peranan dan tugas kepolisian dan aparat keamanan dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan Dominan di Sambas dan Hubungan Antar-Suku Bangsa

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia.⁷ Suku bangsa sebagai golongan sosial yang askriptif⁸ mempunyai ciri yang primordial atau yang pertama dan utama. Seorang tergolong dalam sesuatu suku bangsa karena dilahirkan oleh orang tua yang tergolong dalam sesuatu suku bangsa tersebut. Dia dibesarkan oleh orang tua dan dijadikan manusia dengan menggunakan kebudayaan orang tuanya sebagai acuannya. Tanpa disadari dan dikehendaknya dia menjadi anggota sesuatu suku bangsa dan menjadi pendukung dan pemilik kebudayaan suku bangsanya, karena perbuatan orang tuanya.

Sebagai golongan sosial yang askriptif dan primordial, suku bangsa terikat oleh adanya hubungan darah dan asal dari para pelakunya, sehingga secara nyata yang kita lihat dari mereka yang tergolong dalam sebuah satuan

suku bangsa adalah satuan biologi, yaitu keluarga, kelompok kerabat atau klen, komuniti, dan masyarakat. Sebagai kelompok atau masyarakat sebuah suku bangsa mereka menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat sumber daya-sumber daya yang dimanfaatkan oleh anggota-anggota suku bangsa tersebut untuk kelangsungan hidup. Cara-cara pemanfaatan sumber daya-sumber daya yang ada dalam lingkungan dilakukan dengan menggunakan kebudayaan yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Masing-masing masyarakat suku bangsa, dengan kata lain, mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dan kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat suku bangsa lainnya. Masing-masing masyarakat suku bangsa tersebut juga mengembangkan pranata-pranata sosial yang bisa berbeda-beda coraknya.

Masyarakat suku bangsa Melayu yang hidup di Kabupaten Sambas telah mengembangkan pranata politik yang berbentuk kerajaan atau kesultanan, sedangkan masyarakat suku bangsa Dayak yang hidup di daerah pedalaman dan menjadi tetangganya tidak mengembangkannya. Orang Melayu, sebagai suku bangsa, mengadopsi agama Islam sebagai agama mereka dan menjadikannya sebagai kebudayaan atau pedoman yang menyeluruh bagi kehidupan mereka untuk hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya Orang Dayak, adalah suku bangsa yang menganut agama nenek moyangnya sebagai pedoman bagi kehidupan mereka. Orang Dayak yang mengganti agama nenek moyangnya dan masuk Islam dinamakan "masuk Melayu" dan bukan "masuk Islam." Karena Islam bagi Orang Melayu bukan sekedar pedoman beribadah tetapi keseluruhan

⁷ Suparlan, Parsudi, 1979, "Ethnic group of Indonesian," *The Indonesian Quarterly*, Vol. 2, No.7, CSIS, hlm. 53-75. Lihat juga Suparlan, Parsudi, "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar-Suku Bangsa." dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia, hlm. 149-173.

⁸ Barth, Fredrik, 1969, "Introduction," dalam Fredrik Barth (ed.) *Ethnic Group and Boundaries*. Boston: Little Brown and Company, hlm. 9-38.

kebudayaan atau pedoman bagi kehidupan mereka, sebagaimana yang diketahui oleh orang Dayak mengenai orang Melayu dan kebudayaannya. Sedangkan bagi orang Dayak yang telah beragama Kristen (Katolik), mereka itu tetap mempertahankan keyakinan keagamaan asli mereka yang secara praktikal berguna dalam menghadapi lingkungan kehidupan yang sebagian besar masih bercorak alami.

Dalam perspektif tersebut, wilayah Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai dua wilayah kebudayaan yang berbeda. Di daerah pantai barat terdapat wilayah kebudayaan Melayu yang Islam, yang merupakan kebudayaan suku bangsa dominan yang di masa lampau terpusat di Kesultanan Sambas. Sedangkan daerah pedalaman di bagian timur Kabupaten Sambas adalah wilayah kebudayaan Dayak yang bercorak egaliter, yang merupakan kebudayaan dominan di wilayah tersebut. Baik orang-orang Melayu maupun orang-orang Dayak menyadari keberadaan dan dominasi dari kebudayaan suku bangsa mereka masing-masing dan mereka itu saling menghormati. Karena itu hubungan antara dua suku bangsa tersebut berada dalam suatu hubungan yang harmonis dan simbiotik yang saling menguntungkan. Berbagai suku bangsa pendatang yang menetap di Kabupaten Sambas menyadari adanya dua kebudayaan suku bangsa yang dominan tersebut, dan mereka menghormatinya dan cenderung menjadi seperti Melayu atau seperti Dayak, tergantung pada di mana wilayah tempat kehidupan para pendatang tersebut. Orang-orang Bugis, misalnya cenderung menjadi seperti Melayu dan bahkan menjadi Melayu. Kebiasaan membawa badik di tempat umum dan menggunakannya bilamana rasa harga

diri mereka tersinggung tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan adat Melayu yang berlaku. Mereka juga menjadi seperti Orang Melayu, yaitu lebih senang menyelesaikan persengketaan dengan cara bermusyawarah dan berdamai, dan bila perlu meminta maaf.

Suku bangsa-suku bangsa dengan kebudayaan-kebudayaannya masing-masing sudah ada selama berabad-abad dan selama bergenerasi sebelum adanya Indonesia. Indonesia baru ada secara *de jure* dan *de facto* karena suku bangsa-suku bangsa yang ada dalam wilayah jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda, dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sistem nasional Indonesia memantapkan keberadaannya dengan melalui berbagai pranata yang ada di dalam dan melalui pemerintahan administrasinya. Secara umum, sistem nasional Indonesia di satu pihak telah melemahkan kesukubangsaan dari sebagian warga masyarakat Indonesia karena besarnya semangat keindonesiaan atau kebangsaan Indonesia, tetapi di lain pihak juga telah memperkuat kesukubangsaan karena berbagai pranata yang ada dalam sistem nasional Indonesia telah gagal dalam menyajikan peranan-peranan dan aturan-aturan yang secara adil dan beradab dapat menyajikan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang dianggap penting oleh masyarakat suku bangsa yang bersangkutan.

Pranata-pranata yang ada dalam sistem nasional tidak semuanya berjalan secara sempurna dan efektif dalam memantapkan sistem nasional Indonesia di wilayah-wilayah suku bangsa. Bahkan keberdayaan dan

efektifitas dari pranata-pranata yang ada dalam masyarakat-masyarakat suku bangsa menjadi dibuat tidak berdaya oleh pengaktifan pranata-pranata nasional yang menekankan penyeragaman. Di satu pihak pranata-pranata dari masyarakat suku bangsa setempat dilemahkan dan di pihak lain pranata-pranata nasional yang diberlakukan dalam masyarakat suku bangsa setempat tidak efektif karena para pejabat atau fungsionaris yang menjalankan pranata-pranata tersebut tidak melakukannya secara profesional atau melakukannya secara korup.

Di antara berbagai pranata yang dirasakan sebagai tidak efektif atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya adalah pranata-pranata yang menjamin rasa keadilan, perlindungan dan ancaman, dan penegakan rasa aman dan keteraturan sosial. Ini terutama dirasakan di Kabupaten Sambas oleh warga masyarakat Melayu dan Dayak di mana berbagai aturan yang berlaku di tempat-tempat umum yang semula berdasarkan atas adat Melayu dan adat Dayak telah dilemahkan dan digantikan oleh adanya pranata-pranata nasional Indonesia, tetapi pranata-pranata nasional tersebut tidak mampu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang sejahtera secara adil dan beradab.

Orang Madura di Kabupaten Sambas

Orang Madura telah datang dan tinggal di Kalimantan Barat sejak tahun 1920-an. Sebelum Perang Dunia II, keberadaan mereka secara sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat tidak signifikan. Karena jumlah mereka yang kecil dan karena posisi mereka yang pada umumnya sebagai buruh kasar, dilihat secara

sosial adalah rendah. Pada masa sekarang, sebelum terjadinya kerusuhan tahun 1999, orang-orang Madura hidup di hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Sambas — di desa-desa dan dusun-dusun maupun di daerah perkotaan.

Orang-orang Madura hidup mengelompok sesama mereka sendiri baik yang hidup dalam sebuah komunitas yang berupa dusun yang terpisah sama sekali dari kehidupan orang-orang Melayu atau orang-orang Dayak maupun yang hidup dalam komunitas-komuniti yang kesemuaarganya orang-orang Madura dalam desa Orang Melayu atau desa Orang Dayak. Dalam keadaan demikian, komunitas Orang Madura hidup bertetangga dengan warga desa Melayu atau Dayak setempat. Di daerah perkotaan, di kota Singkawang misalnya, mereka juga hidup mengelompok dalam lingkungan ketetanggaaan yang kesemuanya orang-orang Madura. Pusat dan sebuah komunitas Orang Madura adalah tempat ibadah mereka. Pada waktu jumlah mereka itu sedikit maka pusat komunitasnya adalah langgar atau mushola. Bila jumlah anggota komunitasnya bertambah maka pusat komunitas tersebut adalah mesjid, dan biasanya dibarengi dengan pesantren. Langgar atau mesjid dan pesantren adalah eksklusif Madura. Karena, bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Kyai dan komunitas Madura setempat adalah tokoh panutan dunia dan akhirat bagi masing-masing warga masyarakat setempat. Para kyai ini adalah guru ngaji dari anak-anak di masing-masing komunitas Madura, dan imam dalam kegiatan-kegiatan sembahyang berjamaah atau pemimpin upacara-upacara keagamaan yang mereka jalankan. Orang-orang Madura hanya bersembahyang berjamaah di surau

atau mesjid Madura, yang khotbahnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Madura.

Menurut orang-orang Melayu, Dayak, Cina, Bugis, Jawa, Batak, dan semua suku bangsa yang tinggal di Kabupaten Sambas, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun yang di daerah pedesaan, hidup berdampingan dengan orang-orang Madura hanya merugikan mereka saja. Kerugian harta benda dan kehormatan. Orang-orang Melayu merasa bahwa orang-orang Madura tidak menghargai harkat martabat mereka sebagai manusia dan sebagai penduduk setempat, dan juga memandang sebelah mata adat istiadat yang mereka junjung tinggi sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan mereka. Orang-orang Madura telah memperoleh keuntungan secara berlebihan (tanah-tanah pertanian dan kebun, rumah, monopoli kegiatan-kegiatan ekonomi jasa dan bisnis, monopoli eksploitasi atas sumber-sumber daya alam yang ada) dengan cara-cara curang, ancaman, pemerasan, dan kekerasan berupa teror mental dan penyiksaan serta pembunuhan. Orang-orang Madura tidak pernah merasa bersalah terhadap warga masyarakat setempat walaupun perbuatan tersebut secara etika dan moral yang berlaku setempat maupun secara umum adalah salah dan secara hukum juga melanggar ketentuan hukum.

Warga masyarakat setempat dari berbagai asal suku bangsa dan lapisan sosial di Kabupaten Sambas melihat orang-orang Madura sebagai pencuri, perampok, dan preman atau tukang palak. Waktu saya katakan kepada mereka dalam diskusi-diskusi kelompok di kota Sambas, Tebas, Pemangkat, dan di ibu kota kecamatan Jawai mau-

pun secara pribadi dalam berbagai wawancara, bahwa orang-orang Madura yang pencuri, perampok, dan preman atau tukang palak itu tidak semua Orang Madura di Sambas, mereka semuanya membantahnya. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa mereka kemudian memberikan contoh-contoh berdasarkan per halaman masing-masing dan yang dibenarkan oleh yang lain-lainnya, mengenai bagaimana mereka itu telah dirugikan oleh orang-orang Madura. Bahkan mereka mengatakan bahwa bos para preman Madura adalah para kyai yang tokoh masyarakat Madura atau mereka yang bergelar haji.

Menurut mereka, luas tanah dan kebun dan sawah serta halaman rumah mereka bisa bergeser menjadi semakin kecil dari waktu ke waktu karena pagar hidupnya yang menjadi batas tanah mereka dengan tanah milik orang Madura itu bergeser. Begitu juga padi, tanaman palawija, pohon buah-buahan adalah mereka yang menanam dan merawatnya tetapi orang-orang Madura yang memetik hasilnya tanpa mereka itu berani untuk melarangnya, 'takut diparang' kata mereka. Ayam dan itik tidak sempat bertelur karena hilang dari kandang pada malam hari, dan berbagai contoh lainnya yang amat banyak untuk disebutkan. Selanjutnya mereka menunjukkan kasus-kasus monopoli pelayanan transportasi di kota Sambas dan Singkawang misalnya, yang telah dilakukan dengan ancaman terhadap orang-orang yang bukan Madura, dan pemalakan terhadap supir-supir angkutan umum yang bukan asal Madura, pemalakan atas usaha-usaha dagang dan bisnis terhadap pedagang dan pemilik warung atau toko oleh preman-preman Madura, dan berbagai

kegiatan pemerasan dan pencurian lainnya yang merugikan mereka.

Orang-orang Madura, laki-laki dan perempuan, selalu menyelipkan pisau atau badik di pinggang mereka pada waktu mereka berada di tempat-tempat umum. Sering kali mereka menonjolkan senjata yang mereka bawa tersebut secara demonstratif, untuk menakut-nakuti masyarakat di tempat-tempat umum atau pasar. Walaupun sudah ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas setelah peristiwa Sanggao Ledo, yaitu kerusuhan Dayak Madura pada tahun 1996-1997, tetap saja orang-orang Madura di Kabupaten Sambas selalu membawa senjata tajam di tempat-tempat umum. Alasan mereka adalah bahwa pisau atau badik tersebut berfungsi sebagai pengganti tulang rusuk ketujuh, yang hanya ada enam buah. Mereka dengan mudah mencabut pisau atau badik untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mereka hadapi.

Oleh warga masyarakat setempat, dari berbagai asal suku bangsa, orang-orang Madura dikenal sebagai sebuah kelompok suku bangsa yang kuat solidaritas atau tolong-menolongnya. Menurut mereka, bila seorang Madura mengalami kesulitan karena adanya konflik dengan warga setempat maka orang-orang Madura yang ada setempat akan memihaknya atau membelanya tidak peduli apakah dia itu salah atau benar. Bahkan menurut cerita seorang petugas kepolisian di Tebas, mereka juga berani menyerang Pos Polisi atau kantor Polsek, dan bahkan di Pontianak pernah menyerang kantor Polres. Mereka memperoleh kesan bahwa orang-orang Madura memegang prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Prinsip tersebut telah digunakan oleh orang-orang Madura dalam upaya

mereka untuk mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Sambas dan di Kalimantan Barat pada umumnya. Pendominasian telah dilakukan oleh orang-orang Madura dengan cara-cara kekerasan dan kecurangan yang bertentangan dengan adat istiadat Melayu maupun Dayak yang berlaku setempat.

Orang-orang Melayu yang tidak terbiasa hidup dengan cara kekerasan dalam memenangkan sesuatu persaingan menjadi takut, dan lebih-lebih lagi dengan cara kekerasan yang curang (menurut mereka orang Madura selalu menolurit atau menusuk dengan pisau pihak lawan dari belakang pada waktu si lawan tersebut lengah). Selama sekian puluh tahun dan sekian generasi mereka menekan rasa ketakutan dan frustrasi dengan harapan bahwa penegak hukum akan dapat mengatasi ketidakadilan tersebut. Tetapi harapan mereka ternyata tidak pernah terlaksana. Bahkan, menurut kesan mereka, orang-orang Madura semakin merajalela yang membuat orang-orang Melayu menjadi semakin takut.

Orang-orang Melayu takut menghadapi orang-orang Madura yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang biasanya mereka lakukan dengan cara pengeroyokan. Pada dasarnya orang-orang Melayu adalah individualis-individualis yang tidak mengenal adanya solidaritas suku bangsa seperti yang dipunyai oleh orang-orang Madura. Karena itu dalam menghadapi orang-orang Madura di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka itu berada dalam posisi orang-perorang yang dihadapkan pada sebuah kelompok bersenjata Madura yang utuh dan yang siap menghancurkan mereka. Mereka juga mengaku bahwa dalam

berargumentasi mengenai sesuatu kebenaran dengan orang-orang Madura mereka itu selalu kalah, karena orang-orang Madura mempunyai logika yang aneh.

Salah seorang dan mereka menunjukkan contoh, bahwa pada waktu dia menegur seorang tetangganya yang mengambil buah kelapa dalam jumlah banyak dari pohon-pohon kelapa yang ada di halaman rumahnya, si tetangga Madura tersebut mengatakan bahwa dia telah diberi izin olehnya kemarin untuk boleh meng-

ambil buah kelapanya. Si Melayu mengatakan: 'Itu kan kemarin, dan saya memberikan izin mengambil buah kelapa untuk masak di rumah bukan untuk kamu jual di pasar.' Si Madura mengatakan izinnya tidak mengatakan kelapa yang saya

ambil untuk masak. 'Izin sudah kamu berikan kepada saya apa kamu mau mengingkari izin yang telah kamu berikan? Saya minta ganti rugi kalau tidak kamu izinkan atau kamu akan saya sakiti kalau tidak diberi ganti rugi,' kata si Madura sambil memegang parangnya. Menurut cerita si orang Melayu, orang Madura tersebut selama enam bulan mengurus habis buah kelapa dan pohon-pohon miliknya, tanpa si Melayu berdaya untuk menolaknya. Akhirnya si Melayu dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah ke Pontianak. Contoh lain adakah cerita seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, yang pulang ke rumah mendapati seorang Madura sedang menurunkan buah

jambu dari pohon miliknya yang lebat buahnya. Dia bertanya: 'kamu mencuri buah jambu saya?' Si Madura menjawab: 'Saya tidak mencuri, mencuri itu dilakukan malam hari dan itu dosa. Saya hanya mengambil buah jambu.'

Kerusuhan Sambas dan Pemicunya

Frustrasi sosial yang meluas dan mendalam karena merasa bahwa kehidupan mereka itu didominasi secara curang

dan dengan kekerasan yang sewenang-wenang oleh orang Madura, telah membuat orang Melayu hanya mampu menggerutu dan mengeluh. Tidak seorang pun di antara mereka, sebelum kerusuhan, yang berani menantang dominasi tersebut.

Mereka juga mengaku bahwa dalam berargumentasi mengenai sesuatu kebenaran dengan orang-orang Madura mereka itu selalu kalah, karena orang-orang Madura mempunyai logika yang aneh

Mereka hanya dapat ikut bersorak sorai di dalam batin pada waktu terjadi kerusuhan Dayak-Madura di tahun 1996-1997 di mana korban orang-orang Madura yang terbunuh cukup banyak. Orang Melayu berbeda dan orang Dayak. Orang Dayak, yang mempunyai corak kesukubangsaan mirip dengan orang Madura mampu untuk melawan kekerasan Orang Madura dengan kekerasan dan kekejaman dengan kekejaman dan bahkan melebihi kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Madura.

Antara tahun 1962 - 1999 telah terjadi kerusuhan antara Madura-Dayak sebanyak 11 kali. Kerusuhan dengan korban yang terbunuh serta harta benda yang hancur yang paling

besar pada kedua belah pihak adalah yang terjadi pada tahun 1996-1997.⁹ Pada setiap konflik Dayak-Madura yang telah terjadi selama 11 kali tersebut, konflik selalu dihentikan oleh sebuah perjanjian damai antara pihak Dayak dan Madura yang diwakili oleh masing-masing tokohnya. Tetapi setiap perjanjian damai tersebut selalu dilanggar oleh orang Madura yang melukai atau membunuh orang Dayak dalam sesuatu persengketaan.

Orang Madura memperoleh kekuatan untuk menang dan berani dalam perkelahian bersenjata karena percaya pada doa atau jimat atau *isim* yang diberikan oleh para kyainya. Sedangkan orang Dayak memperoleh kekuatan keberanian dan roh panglima-panglima perang yang menjadi nenek moyang mereka yang dapat mereka panggil untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian kehidupan mereka. Untuk itu mereka harus melakukan upacara *matok* untuk memanggil *tariu* (roh panglima perang, walaupun arti kata *tariu* sebenarnya adalah teriakan perang), yaitu dengan cara menyembelih ayam jantan dan anjing jantan berbulu merah (coklat) untuk tradisi Dayak Sungkung, Bengkayang, Selamantan, dan Seluas atau ayam jantan dan anjing jantan berbulu hitam untuk tradisi Dayak di Jawai, Tebas, Pemangkat, Paloh dan yang hidup di pantai barat Kabupaten Sambas. Darah dari hewan yang disembelih tersebut ditampung di sebuah mangkok, dan dalam sebuah upacara yang sakral di mana para pelakunya menari dan berdoa, mereka meminum darah tersebut. Mangkok yang kemudian berwarna merah karena darah yang sudah mengering tersebut (biasanya dinamakan

mangkok merah) diedarkan ke desa-desa atau ke komuniti-komuniti Dayak lainnya, untuk memberitahukan peperangan yang mereka lakukan dan untuk meminta solidaritas mereka. Pada waktu sebuah peperangan, seperti yang terjadi antara orang Dayak dengan orang Madura, itu sudah selesai atau berhenti maka para roh panglima perang itu harus dikembalikan ke tempat asal peristirahatannya kembali. Upacara pengembalian roh-roh tersebut menurut keterangan seorang tokoh adat Dayak harus dilakukan agar para roh panglima tersebut tidak mengganggu kehidupan orang Dayak yang mencintai kehidupan dan kedamaian dengan sesama.

Berbeda dengan konflik antara orang Dayak dengan Madura yang telah terjadi berkali-kali, konflik antara Melayu dengan Madura sebagai sebuah kerusuhan antarsuku bangsa baru terjadi sekali pada tahun 1999 dan berlangsung secara besar dan menyeluruh serta habis-habisan. Kesan saya dari kerusuhan yang terjadi adalah 'Orang Melayu mengamuk,' seperti mengemukakan tokoh *Hang Jebat* dalam *Hikayat Hang Tuah*. Orang-orang Melayu yang biasanya lemah lembut budi pekertinya dan penakut telah berubah menjadi beringas dalam kelompok-kelompok amuk massa yang tidak dapat dibendung lagi dalam menghadapi orang-orang Madura setempat. Keberingasan orang-orang Melayu, khususnya para pemuda dan remajanya, telah dipicu oleh peristiwa 'Parit Setia' dan sejumlah peristiwa yang terjadi setelah itu.

Pada tanggal 19 Januari 1999, tepat pada hari Raya Idul Fitri, warga masyarakat desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, diserang oleh kira-kira 200 orang Madura dari Desa Sanimakmur,

⁹ Suparlan, Parsudi, 1998, *op. cit.*, hlm. 7-9.

Kecamatan Tebas yang bertetangga dengan Kecamatan Jawai. Tiga orang penduduk Desa Parit Setia dibunuh dan sejumlah lainnya luka-luka. Dua orang polisi dari Polsek Jawai yang menghadang orang-orang Madura tersebut dibuat tidak berdaya dan senjata mereka dirampas. Peristiwa Parit Setia tersebut bermula dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, di mana seorang pencuri asal Madura dari Desa Sarimakmur Kecamatan Tebas tertangkap basah pada waktu sedang masuk rumah setelah membongkar pintu dari rumah seorang penduduk pada malam hari tanggal 17 Januari 1999. Pencuri sial tersebut ditangkap, dikeroyok, dan dipukuli sampai babak belur oleh para tetangga yang kecurian. Kemudian dia diserahkan kepada Pos Polisi setempat. Petugas kepolisian pada pagi harinya membawanya ke dokter Puskesmas, diobati dan disuruh pulang. Alasannya tidak berani menanggung risiko kalau Pos Polisi diserang oleh orang-orang Madura lainnya.

Apa yang menyakitkan hati orang-orang Melayu dari peristiwa penyerangan Desa Parit Setia adalah teriakan 'Allahu Akbar' berkali-kali yang dikumandangkan oleh para penyerang asal Madura, dan teriakan-teriakan mengejek orang-orang Melayu sebagai 'kerupuk' dan 'Melayu kalah 3 - 0' (artinya tiga orang Melayu meninggal dunia dan tidak satu pun dari penyerang Madura). Para pemuda Melayu dari desa-desa di kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kecamatan Jawai menjadi resah dan bersiap-siap untuk menyerang rumah dan dusun orang-orang Madura. Tetapi, pada tanggal 23 Januari 1999, berkat bantuan para pejabat dan tokoh masyarakat, masyarakat Melayu Parit Setia dan masyarakat Madura Sarikmakmur

mengadakan perdamaian. Suasana panas menjadi reda kembali, walaupun orang-orang Melayu masih memendam rasa sakit hati karena tidak sepele kata pun 'minta maaf' disampaikan oleh orang-orang Madura atas kematian tiga orang warga Parit Setia.

Pada tanggal 21 Februari 1999 seorang preman Madura naik kendaraan umum dari kota Singkawang ke arah kota Sambas dan tidak mau membayar pada waktu berhenti di Desa Semparuk. Merasa sakit hati karena dipelototi oleh kenek dan supir yang orang Melayu, si preman pulang ke rumah mengambil clurit, menghadang kendaraan umum tersebut yang kembali ke arah kota Singkawang dan menclurit si kenek mobil. Pada jam 01.00 keesokan harinya tanggal 22 Februari, orang-orang Melayu di Desa Semparuk yang sebagian besar adalah para pemuda dan remaja menyerang rumah si preman yang bernama Rodi bin Muharap. Tetapi Rodi bin Muharap tidak ditemukan dan sebaliknya seorang Melayu meninggal ditembak oleh orang-orang Madura teman Rodi dengan menggunakan senjata lantak. Peristiwa kematian seorang Melayu tersebut membakar kemarahan pemuda-pemuda dan remaja Melayu yang sudah tidak dapat dikendalikan oleh orang-orang tua mereka. Pada jam 02.00 pagi hari itu juga mereka menyerang dan membakar atau menghancurkan rumah-rumah dan ruko-ruko milik orang-orang Madura yang ada di desa-desa di wilayah kecamatan Tebas, Pemangkat, dan Jawai. Sejumlah orang Madura meninggal dan luka-luka dan tercatat ada 60 bangunan rumah dan ruko yang hancur. Kegiatan penyerangan untuk menghancurkan orang-orang Madura dari rumah-rumah mereka berlangsung terus sampai tanggal 27 Februari 1999.

Pada tanggal 27 Februari 1999 penyerangan orang-orang Melayu terhadap orang-orang Madura dan rumah-rumah mereka dihentikan karena orang-orang Melayu tunduk pada tokoh-tokoh masyarakatnya yang telah menandatangani perjanjian bersama dengan tokoh-tokoh Madura untuk berdamai pada hari itu. Mereka juga sepakat untuk tidak membawa senjata tajam atau senjata lantak di tempat-tempat umum. Tetapi perjanjian ini dilanggar pada tanggal 14 Maret 1999 oleh seorang Madura asal Desa Sempadung yang membawa senjata tajam di jalan raya yang ketika ditegor oleh seorang pemuda Melayu malah menikamnya. Hari itu juga orang-orang Melayu lalu mengambil tekad untuk tidak berdamai lagi dengan orang-orang Madura. Sejak saat itu perang antara pemuda-pemuda Melayu melawan orang-orang Madura berlangsung di semua desa dan kota dalam wilayah Kabupaten Sambas. Kalau sebelum terjadinya kerusuhan Melayu-Madura yang terjadi adalah orang-orang Madura yang menyerang orang-orang Melayu yang ketakutan, maka sekarang menjadi terbalik. Kampung-kampung orang Madura di kota Singkawang dan di desa-desa di tiga kecamatan yang terletak di bagian selatan kota Singkawang secara relatif masih belum diserang habis-habisan oleh orang-orang Melayu dan Dayak pada waktu penelitian lapangan berakhir pada tanggal 22 April 1999. Sedangkan di wilayah timur dan utara Kabupaten Sambas dapat dikatakan sudah tidak ada lagi sisa-sisa orang Madura. Orang-orang Madura ini dengan cepat diungsikan oleh para petugas keamanan untuk menghindari jumlah korban yang lebih besar daripada yang sudah ada.

Kerusuhan antar suku bangsa

Melayu-Madura nampaknya tidak cukup bagi orang-orang Madura. Mereka masih mencari musuh lainnya, yaitu orang Dayak yang telah menjadi musuh bebuyutan mereka. Pada tanggal 16 Maret 1999, pukul 15.00 sejumlah orang Madura mencegat sebuah kendaraan umum di jalan raya yang melintasi Dusun Panakan Tanjung, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat. Dusun ini adalah dusun tempat tinggal orang-orang Madura. Kendaraan ini mengangkut buruh dan pekerja dari daerah Kecamatan Sambas dan sekitarnya ke arah kota Singkawang. Dalam kendaraan umum tersebut terdapat 2 orang Melayu, 3 orang Jawa dan 26 orang Dayak. Salah seorang di antara orang-orang Dayak tersebut dapat ditangkap oleh orang-orang Madura dan dibunuh di tempat itu juga, sedangkan yang lainnya lari dan bersembunyi di Desa Melayu yang berdekatan. Orang Dayak yang dibunuh tersebut, Martinus Amat bin Paran, adalah warga Desa Selawit Kecamatan Samalantan yang terletak di sebelah timur kota Singkawang.

Kematian Martinus telah menyebabkan orang-orang Dayak melakukan upacara *matok* dan mengedarkan mangkuk merah ke komuniti-komuniti Dayak lainnya. Penyerangan terhadap orang-orang Madura sekarang tidak lagi hanya dilakukan oleh orang-orang Melayu tetapi juga oleh orang-orang Dayak. Situasi masyarakat Kabupaten Sambas betul-betul rusuh. Setiap hari terdengar berita pembakaran dan penghancuran rumah dan pembunuhan. Korban terbunuh dan luka bukan hanya orang-orang Madura tetapi juga orang-orang Melayu dan Dayak. Orang-orang Madura di sebelah timur kota Singkawang dapat dikatakan habis karena dibunuh oleh orang-orang Dayak atau mengungsi dan berada dalam

perlindungan aparat kepolisian dan tentara. Jumlah pengungsi Madura yang ditampung di beberapa tempat di Pontianak dan Singkawang tercatat ada 37.000 orang. Orang Melayu, para pemuda dan orang-orang tua, di Kabupaten Sambas telah bentekad untuk meniadakan orang Madura dan berbagai atributnya dari wilayah mereka. Cara-cara yang mereka lakukan adalah kekerasan yang juga mendapat tanggapan dan orang-orang Madura yang masih ada di Kabupaten Sambas dengan cara kekerasan juga. Karena situasinya yang rusuh ini Kapolda Kalimantan Barat mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi para perusuh dan menangkap serta memproses siapa saja yang kedapatan membawa senjata tajam di tempat-tempat umum.

Kesimpulan

Kerusuhan Sambas telah terwujud karena penumpasan secara sewenang-wenang atas hak-hak budaya yang secara tradisi berlaku dalam wilayah kebudayaan Melayu dan Dayak oleh orang-orang Madura. Penumpasan hak-hak budaya yang dimaksud adalah pendominasian kebudayaan Melayu dan Dayak oleh kebudayaan Madura yang bercorak preman dan kekerasan. Berbeda dengan corak hubungan Melayu - Dayak, atau Melayu dan Dayak di satu pihak dengan berbagai suku bangsa lainnya di Kabupaten Sambas di pihak lain, maka hubungan Madura dengan Dayak dan dengan Melayu secara mencolok memperlihatkan dengan jelas adanya batas-batas atau pagar kesukubangsaan yang membedakan antara kami Orang Madura dengan mereka yang lainnya. Bahkan agama sebagai sebuah kategori sosial yang

dapat mempersatukan orang-orang yang sekeyakinan dan seiman untuk menjadi sebuah kelompok sosial sehingga agama tersebut dapat berfungsi untuk menjembatani perbedaan dan batas-batas kesukubangsaan, telah menjadi tidak berlaku dalam hubungan antar suku bangsa Madura dan Melayu.

Karena orang Madura membangun tempat-tempat ibadah dan melakukan upacara-upacara keagamaan yang hanya berlaku bagi mereka yang Madura, agama Islam dalam kehidupan orang Madura di Sambas adalah agama Islam lokal Madura yang berbeda dari agama Islam yang berlaku umum dan yang dianut oleh serta merupakan keyakinan agama orang Melayu dan berbagai suku bangsa lainnya yang beragama Islam. Karena itu upaya untuk melibatkan orang-orang Melayu ke dalam konflik antara Dayak - Madura yang terjadi pada tahun 1996-1997, yang dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat Madura telah gagal. Para tokoh Madura mengeluarkan isu bahwa konflik Dayak-Madura di Sambas dan Kalimantan Barat adalah konflik agama, yang dipicu oleh upaya kristenisasi oleh para pastor (hasil wawancara saya dengan para tokoh Madura Kabupaten Sambas di Singkawang pada tahun 1998). Para tokoh Madura ini tidak tahu isi hati orang-orang Melayu yang memendam rasa sakit hati terhadap orang-orang Madura, dan mereka juga tidak tahu bahwa hubungan antara orang Melayu dengan orang Dayak bukanlah hubungan antarkeyakinan agama yang berbeda.

Kesewenang-wenangan Madura dan cara-cara preman yang mereka lakukan di Kabupaten Sambas sebetulnya tidak akan mungkin terwujud bila dalam kehidupan masyarakat Sambas terdapat patokan aturan-aturan yang

adil dan beradab yang diberlakukan secara terkendali dan konsisten oleh penegak hukum atau polisi yang bersih dan berwibawa. Diberlakukannya aturan-aturan yang mengacu pada hukum positif di Sambas adalah karena kebudayaan dominasi Melayu dan Dayak telah dilemahkan, kalau kita tidak ingin mengatakan dihancurkan, oleh sistem nasional melalui berbagai kebijaksanaan dan kegiatan oknum pejabat yang mempunyai berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang Kolutif, Koruptif dan Nepotis (KKN).

Karena polisi juga takut pada kekerasan orang-orang Madura, dan karena polisi serta aparat keamanan juga tidak bersih dari sejumlah praktek KKN, maka kesewenang-wenangan orang-orang Madura terhadap orang-orang Melayu dan Dayak menjadi semakin memantapkan pagar pembatas antara suku bangsa Madura dengan suku bangsa-suku bangsa lainnya. Dan, dampaknya adalah bahwa orang-orang Madura itu sendiri menganggap bahwa kecurangan dan kekerasan yang mereka lakukan terhadap suku bangsa lainnya adalah sesuatu yang wajar.

Konflik antar suku bangsa yang terwujud sebagai kerusuhan dalam bentuk pembunuhan, pengusiran, dan penghancuran atas segala harta benda yang dimiliki orang Madura yang dilakukan oleh orang Melayu adalah berbeda dari konflik ideologi. Bila konflik ideologi dapat dirundingkan dan diadakan tawar-menawar di antara yang bermusuhan, maka konflik antar suku bangsa hanya mungkin dapat dirundingkan dan didamaikan pada tahap-tahap permulaan terjadinya konflik tersebut. Bila dalam konflik ideologi ada salah satu pihak yang berilaku curang maka kecurangan

tersebut masih dapat ditawarkan lagi dengan imbalan sejumlah kompensasi oleh pihak yang curang, tetapi dalam konflik antarsuku bangsa yang terwujud sebagai kerusuhan bila ada salah satu pihak yang berlaku curang atau mengkhianati perjanjian maka kecurangan pihak lawan akan mengakumulasi kebencian dan semangat penghancuran oleh pihak yang dicurangi terhadap yang mencurangi, karena konflik antar suku bangsa adalah konflik primordial, yang merupakan ungkapan perjuangan untuk keberadaan dan kelangsungan hidup sebagai sebuah keyakinan yang penuh dengan muatan emosi.

Dalam kasus kerusuhan Sambas, perjuangan untuk keberadaan dan kelangsungan hidup adalah berbeda antara yang dipunyai oleh orang Melayu dengan yang dipunyai oleh orang Madura. Bila orang Melayu berjuang untuk memperoleh apa yang selama ini mereka rasakan sebagai telah dirampas atau dihancurkan oleh orang Madura melalui berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan, maka bagi orang Madura adalah mempertahankan posisi-posisi dengan peranan-peranan yang selama ini telah mereka nikmati sebagai sebuah golongan sosial yang dominan di Kabupaten Sambas. Atau dengan kata lain, mereka berjuang untuk mengambil kembali apa yang telah diambil kembali oleh orang Melayu. Permasalahan ini masih akan berbuntut panjang karena Kabupaten Sambas bukan sebuah wilayah yang terisolasi, dan orang-orang Madura tersebar di hampir seluruh pelosok Kalimantan Barat. Juga, karena pemerintah Indonesia belum secara serius memperhatikan permasalahan preman dan pemberantasannya.

Daftar Kepustakaan

- Barth, Fredrik, 1969, 'Introduction.' Dalam, Fredrik Barth (Ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*.
Boston: Little Brown and Company. Hlm.9-38.
- Bruner, Edward M., 1974, 'The Expression of Ethnicity in Indonesia,' dalam, Abner Cohen (Ed.), *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hlm.251-288.
- Douglas, Mary, 1966, *Purity and Danger: An analysis of concepts of pollution and taboo*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Suparian, Parsudi, 1972, *The Javanese In Bandung: Ethnicity in a medium sized Indonesian city*. MA Thesis. University of Illinois.
- _____, 1979, 'Ethnic Groups of Indonesia,' *The Indonesian Quarterly*, Vol.2, No.7, CSIS. Hal. 53-75.
- _____, 1986, 'Kebudayaan dan Pembangunan,' *Media IRA*, Vol.14, No.11, Jurusan Antropologi, U.I. Hlm.106-135.
- _____, 1998, 'Konflik Antara Orang Dayak dan Orang Madura di Kalimantan Barat,' *Wacana Antropologi*, Vol.2, No.2, Asosiasi Antropologi Indonesia. Hlm.7-9.
- _____, 1995, *The Javanese in Surinam. Ethnicity in an ethnically plural society*. Tempe, Arizona: Center for Southeast Asian Studies, Arizona State University.
- _____, 1999a, 'Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar Sukubangsa,' dalam, I. Wibowo (Ed.), *Restrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Grarnedia. Hlm. 149-173.
- _____, 1999b, *Kerusuhan Sambas*. Makalah Terbatas disampaikan kepada Kapolri.
- _____, 1999c, *Kemajemukan, Hipotesa Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan*. Makalah, Jubileum ke-30 Jurnal Antropologi Indonesia, U.I. Depok, 6 Mei 1999.

Abstraks Tesis

The Tattoo and the Fingerprint: Crime and Security in an Indonesian City

Joshua David Barker, 1999

Ph.D. Thesis, Ithaca: The Cornell University

Disertasi ini menguji hubungan antara kecemasan dan kekuasaan kepolisian pusat melalui sebuah studi Institusi keamanan formal dan informal di Bandung, Jawa Barat. Dengan menggunakan perpaduan antara data historis dan etnografis, tesis ini berpendapat bahwa persoalan pokok perkembangan aparat keamanan kota merupakan batas yang membedakan antara kepolisian daerah dan pusat mengenai apakah keamanan itu dan bagaimana kecemasan itu didefinisikan. Institusi-institusi kepolisian pusat mendefinisikan keamanan sebagai suatu keselarasan terbatas antara cetak biru pemerintah dan pengelompokan hal-hal di 'luar sana'. Pada dasarnya, mereka mencemaskan ancaman dan kegagalan pengenalan (misalnya kriminogen, impostor). Untuk menghindari ancaman-ancaman ini mereka memberlakukan perintah patroli dengan menggunakan peta, kartu identitas, sidik jari, dan hukum/undang-undang. Sebaliknya, institusi-institusi kepolisian daerah mendefinisikan keamanan sebagai persoalan Integritas sosial dan fisik. Mereka mencemaskan orang-orang luar dan tanda-tanda aneh (misalnya orang yang belum dikenal, pencuri, tubuh bertato), dan melakukan mobilisasi terhadap ancaman-ancaman itu dengan pola teritorial. Paruh pertama disertasi ini menekankan gap antara dua opini mengenai keamanan dengan mengupas dinamika-dinamika eksternal tiga institusi berikut: ronda (patroli lingkungan), jawara (jagoan kampung, ketua gang), dan kepolisian. Masing-masing institusi ini dianalisa secara interpretatif menyangkut praktek-prakteknya, organisasinya, teknologinya, definisi ancamannya, sejarahnya, dan bentuk-bentuk kekuasaan politiknya. Paruh kedua disertasi ini menguraikan akibat-akibat gap praktek kepolisian di zaman Orde Baru Suharto. Secara khusus, dua kasus dianalisa, pekerjaan sehari-hari kepolisian sektor di mana para petugas kepolisian bertindak sebagai agen patroli kepolisian pusat maupun sebagai pelindung lingkungan setempat terhadap efek-efek hukum; dan upaya-upaya kepolisian di tahun 1980-an untuk membasmi 'kriminalitas' dan mensubordinasikan institusi-institusi keamanan pada kontrol kepolisian pusat melalui PETRUS (Pembunuhan Paramiliter terhadap Para Penjahat) dan SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan). Sementara pada tingkat sektor kepolisian difungsikan untuk mempertahankan pemisahan antara perhatian

kepolisian daerah dan pusat, PETRUS dan SISKAMLING diupayakan untuk menghilangkan gap itu dengan mengorganisir kekuasaan simbolis dan institusional dalam rangka mengenali kecemasan kepolisian pusat dengan kecemasan kepolisian daerah dan mendefinisikan kembali semua keamanan sebagai sebuah persoalan dengan satu solusi nasional.

Selamat jalan kepada

**Mayjen (Pol.) Drs. Ahwil Luthan, S.H., M. M., M.B.A.
Brigjen (Pol.) Drs. Ansyad Mbai, M.M.**

**Yang melepas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur PTIK
pada tanggal 26 Juni 2000 dan 24 Juni 2000**

dan

Selamat datang kepada

**Mayjen (Pol.) Drs. J.D. Sitorus M.Sc.
Brigjen (Pol.) Drs. Adang Firman**

Yang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur PTIK yang Baru

Keluarga Besar Jurnal Polisi Indonesia

BHAKTI DHARMA WISATA

Pengaruh Keterampilan Dasar Perorangan Prajurit Bintara Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas di Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung

Saputro Satriyo, 1995

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Keterampilan Dasar Perorangan Prajurit Bintara Terhadap Efektifitas Tugas di Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung. Efektifitas pelaksanaan tugas sebagai salah satu bentuk pelayanan adalah merupakan kenyataan yang perlu dioptimalkan dengan dimulainya dari keterampilan dasar perorangan. Sebab secara faktual sumber daya kesatuan Polri semakin terbatas, sementara di lain pihak tuntutan masyarakat atau pemakai jasa pelayanan menghendaki lebih prima dan seketika. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas adalah keterampilan dasar perorangan para prajurit.

Dalam penelitian ini dicoba untuk mengkaji model penerapan teori keterampilan yang dikonsepsikan oleh Raymon yakni pelatihan keterampilan dasar individu prajurit atau pegawai polisi. Hasil analisa dari temuan penelitian mengajukan alternatif yang seyogianya diterapkan untuk keterampilan para pegawai terhadap program efektifitas pelaksanaan tugasnya.

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan stratifikasi atas dasar stratifikasi golongan. Analisis kuantitatif digunakan Path Analysis (Sidik Jalan) dengan alat bantuan komputer program SPSS (Statistic Package for Social Science).

Hasil analisa pengukuran hubungan variabel-variabel yang teliti menunjukkan:

1. ada pengaruh positif antara keterampilan dasar perorangan Prajurit Bintara (x) dengan efektifitas pelaksanaan tugas (y) yang ditunjukkan dengan nilai $t = 0,5535$. Atas dasar nilai ini $P < 0,05$ dilakukan uji statistik t untuk menunjukkan korelasi signifikansi.
2. Pengaruh positif antara keterampilan dasar perorangan prajurit Bintara terhadap efektifitas pelaksanaan tugas yang dikontribusikan oleh keterampilan mengamati (x_1), keterampilan menggambarkan (x_2), keterampilan mendengar (x_3), keterampilan bertanya (x_4), keterampilan meningkatkan (x_5) dan keterampilan memberi umpan balik (x_6).

Keterampilan mengamati (x_1) cukup efektif dalam pelaksanaan tugas, karena sebagian besar Prajurit Bintara yang bekerja di jajaran Poliwiltabes Bandung telah sejalan dengan bidang tugas-tugas kepolisian.

Dengan demikian metode pembelajaran Training of Trainers (T.O.T) Polri telah terakreditasi di kalangan Perguruan Tinggi Negeri.

Stop Press

Mulai 1 Juli 2000 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengubah sebutan kepangkatan yang berlaku untuk semua jajaran dari Kapolri hingga struktur paling bawah dan akan mengikuti standar internasional kepolisian. Hal itu dijelaskan Kadispem Polri, Brigjen (Pol.) Dadang Garnida, di Jakarta, Jumat (16/6/2000). Berikut sebutan pengantian tersebut:

Jenderal (Pol)

Letjen (Pol.) jadi Komisaris Jenderal Polisi

Mayjen (Pol.) jadi Inspektur Jenderal Polisi

Brigjen (Pol.)

Kolonel (Pol) jadi Senior Super Intendent

Letkol (Pol.) jadi Super Intendent

Mayor (Pol.) jadi Asisten Super Intendent

Kapten (Pol.) jadi Senior Inspektur

Lettu (Pol.) jadi Inspektur I

Letda (Pol.) jadi Inspektur II

Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu

Arief Sulistyanto, 1999

Usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan kuat melakukan usaha dalam sektor ini.

Di Jakarta, khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.

Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjualbelikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini menimbulkan suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron-klien yang bersifat hubungan bapak-anak.

Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dengan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Jadi dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan suku bangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kaki lima tersebut.

Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan di pinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, menimbulkan sampah yang

mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kaki lima. Sebagai koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara (brokerage) bila ada masalah antara pedagang dan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien di mana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini.

Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kaki lima di Pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun Ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kaki lima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Suku Bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antarsuku bangsa dalam lingkungan pasar kaki lima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan — aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemonjolan identitas suku bangsanya.

Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Kampung Pengarangan di Kalurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Gatot Eddy Pramono, 1999

Penelitian tentang Pola Hubungan Patron-Klien Pemulung di Pemukiman Kumuh Liar di RW 15 Kampung Pengarangan di Kalurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur adalah untuk menunjukkan corak keteraturan sosial pemulung yang tinggal di permukiman tersebut yang dipengaruhi oleh pemilik tanah dan bos lapak serta pelindung lain yang berperan sebagai patron yang mendominasi kehidupan sosial di permukiman tersebut.

Permukiman liar di Kampung Pengarangan adalah sebuah permukiman yang masyarakatnya heterogen dengan berbagai macam mata pencahariannya. Permukiman ini ditandai dengan tatanan perumahan yang semrawut, kondisi lingkungan yang kumuh, tanahnya yang masih bermasalah dan corak lingkungan yang berdekatan dengan perempatan Coca Cola di mana para pelaku kejahatan sering beraksi dengan melakukan penodongan, pencurian kaca spion dan penganiayaan serta ditandai pula tempat berlindung/aman (sanctuary) bagi para pelaku kejahatan. Pemulung yang merupakan bagian masyarakat di permukiman tersebut mengadakan interaksi baik dengan pemilik tanah, bos lapak maupun dengan masyarakat setempat. Interaksi tersebut menciptakan pola hubungan sosial pertemanan, perantaraan (brokerage) dan patron-klien. Pola hubungan yang terjadi antara pemulung dan bos lapaknya lebih merupakan pola hubungan patron-klien.

Pola hubungan tersebut merupakan kegiatan yang berpola yang menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan mereka yang menjadi aturan-aturan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Keteraturan sosial pemulung tersebut terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh kehidupan sosial antara pemulung dengan bos lapaknya tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di permukiman tersebut termasuk para pelindung yang ada di permukiman tersebut terutama pemilik lahan.

Dalam tesis ini telah ditunjukkan corak keteraturan sosial pemulung yang dipengaruhi oleh pemilik tanah dan bos lapak serta pelindung yang ada di permukiman tersebut. Corak keteraturan tersebut yaitu hubungan saling mempercayai dan prinsip saling tidak mengganggu.